

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang diperlukan bagi setiap orang dan memiliki sasaran yang sangat luas, yaitu manusia seutuhnya. Pendidikan Umum ini berlaku umum bagi siapa saja terutama dilakukan secara formal di sekolah. Aspek mental yang dikembangkan dalam pendidikan umum adalah keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan pendidikan umum ini adalah membina manusia seutuhnya, yaitu manusia yang seimbang antara kemampuan pikir, perasaan, kesadaran dan ketrampilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursid Sumaatmadja tujuan pendidikan umum: "The making of complete man (R.O. Hand dan D.B. Bidna: 1990: 2). Dari definisi ini kata "making" atau membentuk, tentulah tidak tepat karena manusia tidak dapat membentuk manusia lain. Sebab yang dapat membentuk manusia hanyalah Yang Maha Kuasa saja. Oleh sebab itu kalimat ini diartikan dengan membina. Sementara manusia seutuhnya pada tujuan Pendidikan Nasional RI dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 2 tahun 1989:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Golden Terayon Press: 1990: 4).

Jadi tujuan pendidikan umum tersebut mendukung tujuan Pendidikan Nasional.

Keberadaan Pendidikan Pancasila (PMP) sebagai bagian dari Pendidikan Umum dapat dilihat pada pasal 39 UUSPN yang menyatakan bahwa: isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan Agama, (c) pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya lebih diperjelas bahwa pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan isi kelima sila Pancasila, pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pribadi yang memancarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta perilaku yang berkeadilan sosial. Pentingnya kedudukan PMP ini dikarenakan ia juga berfungsi sebagai pendidikan politik dan pendidikan moral, sehingga menempatkan PMP ini pada posisi sentral. Pendidikan Moral Pancasila ini dikatakan penting dapat dilihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1983 yaitu:

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat

dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat. (Sekretaris Negara RI--:1985:91)

Dari rumusan yang telah dikemukakan dapatlah dikatakan bahwa Pendidikan Moral Pancasila merupakan suatu program pendidikan yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan formal di Indonesia sehingga dapat dikatakan Pendidikan Moral Pancasila merupakan salah satu komponen dari Pendidikan Umum di Indonesia. Pendidikan Pancasila ini dilakukan tidak hanya di sekolah saja melainkan juga di dalam lingkungan keluarga dan di masyarakat. Akan tetapi pendidikan Pancasila yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pendidikan Pancasila yang dilaksanakan di sekolah.

Keberadaan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai bagian dari Pendidikan Umum merupakan ciri budaya dan pola pikir yang tumbuh dari kebutuhan pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan dalam Pendidikan Moral Pancasila terkandung pesan edukatif dan psikologis untuk membawa generasi muda Indonesia agar supaya berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan mandiri didasari oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu dalam Pendidikan Moral Pancasila terkandung pula pesan-pesan politik yang diharapkan dapat membina bangsa Indonesia yang bersatu, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan yang luas. Dengan demikian melalui Pendidikan Moral Pancasila di-

harapkan pula siswa sebagai generasi muda dapat mewarisi, meneruskan, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan sasaran utama dari Pendidikan Moral Pancasila menurut Endang Sumantri (1990: 4) adalah "Membina anak didik untuk menguatkan penalaran keilmuan, mendidik mereka meleak politik dan membekali mereka untuk dapat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi". Untuk mencapai maksud tersebut di atas, pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam membinakan nilai-nilai Pancasila untuk itu ruang lingkup Pendidikan Moral Pancasila mencakup :

(1) Penekanan diberikan kepada ranah afektif yang mendorong semangat, merangsang ilham, menyeimbangkan kepribadian siswa. (2) sasaran akhir PMP adalah dihayati dan diamalkannya Pancasila oleh setiap siswa/lulusan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Kurikulum SMA 1984:GBPP PMP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PMP pada hakekatnya adalah pendidikan moral yang menekankan ranah afektif yang dapat menyeimbangkan kepribadian siswa, dengan sasaran akhir penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hasan Walinono mengatakan bahwa PMP adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang sasarannya bukan semata-mata pengalihan pengetahuan melainkan lebih ditekankan pada pembentukan sikap (Dikdasmen: 1990: 2). Dengan demikian pengajaran PMP ini meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor dengan titik berat pada ranah afektif sehingga adanya kemauan, kesediaan dan keikhlasan didalam diri siswa untuk berbuat sebagai warga yang Pancasila. Dalam

rangka pengajaran ini siapa pun tidak dapat mengingkari peranan guru sebagai pendidik dan pengajar sangatlah penting, karena guru menempati kedudukan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guru dikatakan demikian, karena gurulah yang menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid, sehingga nilai-nilai yang terdapat didalam pelajaran dapat terinternalisasi dalam diri siswa, seperti yang dikemukakan oleh M.I. Soelaeman (1985:19): "Dalam peranannya ini ia berusaha menyampaikan gagasan dan informasi, melatih keterampilan dan membina sikap tertentu kepada siswa-siswanya". Sementara itu peranan guru menurut Nana Sudjana (1989:1) sebagai berikut:

Guru menempati kedudukan sentral, sebab perannya sangat menentukan. Ia harus mampu menterjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum, kemudian mentranspormasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui proses pengajaran di sekolah.

Dari kedua pernyataan ini dapat dikatakan bahwa kedudukan guru dalam menyampaikan, melatih, membina dan mentranspormasikan nilai-nilai kepada siswa melalui proses belajar mengajar tidaklah diartikan sebagai mencekoki pengetahuan kepada siswa-siswanya dan tidak pula hanya sekedar menyampaikan pengetahuan saja. Dalam perannya ini guru juga sebagai pemberi dorongan (motivator), facilisator dan teladan bagi siswa-siswanya. Untuk itu program PMP ini membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki persyaratan

seperti:(1) kemampuan profesional, (2) kemampuan personal, (3) kemampuan sosial. (Rochman Natawijaya: 1990: 4). Kemampuan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang pokok dimiliki oleh guru, karena kemampuan mengajar ini mencakup pada penguasaan materi dan pengelolaan bahan pelajaran serta pengolahan proses belajar mengajar. Jadi pengajaran ini mencakup penyampaian bahan dan pengelolaan proses belajar mengajar, menterjemahkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yang nampak dalam penampilan guru pada saat mengajar.

Berdasarkan pengalaman yang didapat dari melaksanakan studi individual bidang Pancasila pada semester 3 tahun akademik 1991/1992 yang lalu, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila, di mana Pancasila diajarkan sebagai pengetahuan, padahal seharusnya dibinakan agar menjadi sikap para siswa. Artinya guru dalam proses penyampaian materi lebih dominan menekankan pada segi kognitif padahal seharusnya segi afektif pun mendapat porsi yang seimbang dengan yang lainnya. Di samping itu guru-guru yang mengajarkan PMP ini masih ada yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang studi Pancasila (PMP) atau PMPKN. Media pengajaran yang digunakan hanya papan tulis dan kapur tulis, sumber yang dipakai hanya buku paket, GBHN dan UUD 1945 saja. Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki guru tidak jauh berbeda besar dengan yang dimiliki para siswa.

Studi ini hanya dibatasi pada salah satu faktor saja, yaitu faktor guru. Dipilihnya faktor guru ini didasarkan pada pentingnya kedudukan guru dalam proses pendidikan. Sebab bila ditelaah lebih dalam, guru mempunyai peranan yang menentukan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan guru dalam proses pendidikan ini maka, kemampuan profesional guru merupakan suatu hal yang esensial dalam pendidikan di sekolah.

Dengan guru yang profesional diharapkan akan menampilkan perilaku mengajar yang lebih bermutu. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih lancar dan lebih berhasil. Seperti dikemukakan Sutermeister (1976: 25) bahwa: "Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh penampilannya yang sesuai dengan tujuan pendidikan, dan penampilan dalam melaksanakan tugas mengajar sehari-hari". (E. Sasube T: 1989: 6).

Peranan guru ini diwujudkan dalam bentuk penampilan pada saat mengajar. Kemampuan mengajar dan membina yang ditampilkan dalam proses mengajar inilah yang menjadi ukuran apakah guru dengan tugas mengajarnya dapat menghasilkan sesuatu yang berharga bagi para siswanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kadarusmadi (1987: 145) mengungkapkan bahwa "Anak didik tahu tentang Pancasila, namun mereka kurang memahami dan mendalami

nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila”.

Pendidikan Moral Pancasila yang diajarkan kepada para siswa sebenarnya bukan hanya sekedar pengajaran yang memberikan pengetahuan tentang moral Pancasila yang bersifat kognitif belaka, melainkan lebih dari itu diharapkan dapat dibina sikap siswa sehingga mereka betul-betul memahaminya dengan cara membinakan nilai-nilai moral Pancasila melalui metode pendidikan moral yang tepat pada waktu guru tampil di kelas.

Yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini karena adanya kesenjangan pada pengajaran PMP yang seharusnya dibinakan pada para siswa sebagai suatu nilai yang menjadi sikap, bukan sebagai pengetahuan tentang Pancasila. Jadi yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bagaimana guru bidang studi PMP membinakan nilai-nilai moral Pancasila kepada siswanya melalui kegiatan mengajar yang dilaksanakan di kelas dilihat dari penampilannya pada saat mengajarkan PMP.

B. Identifikasi Masalah

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa serta ideologi negara, merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya moral Pancasila mengikat diri masing-masing manusia Indonesia, ia merupakan moral individu, di samping sebagai moral bangsa. Pedoman sikap dan tingkah laku itu bukan semata-mata sebagai kewajiban yuridis, melainkan

menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara. Di dalam sistem pendidikan, PMP merupakan usaha sadar untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan warga negara Indonesia dengan cara membina, menanamkan ketrampilan dan kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan ajaran Pancasila. Pengertian ini menggambarkan bahwa PMP di sekolah bukan hanya proses pengajaran, akan tetapi merupakan suatu proses pendidikan dan pembinaan moral Pancasila.

Sebagai suatu proses pendidikan, PMP mencakup proses sosialisasi dan personalisasi dalam usaha mewariskan nilai-nilai Pancasila. Di dalam proses sosialisasi PMP merupakan bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa agar perilaku siswa sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Kepada anak didik dibina sejumlah nilai-nilai moral dan norma yang dikandung Pancasila, pengetahuan tentang Pancasila. Agar mereka memikirkan, memahami, mengakui, menghargai, mendorong nilai-nilai Pancasila itu menuju pembentukan sikap dan perilakunya. Didalam proses personalisasi, PMP merupakan bantuan yang diberikan kepada anak didik agar mereka menjadikan nilai-nilai, norma Pancasila menjadi nilai-nilai pribadi. Hal ini dapat dilihat dari tujuan Pendidikan moral Pancasila (Depdikbud:1991:8):

1. Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
2. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga timbul keyakinan, motivasi dan kehendak untuk senantiasa bertindak dengan nilai-nilai dan norma Pancasila dan UUD 1945....

Dengan demikian diharapkan dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan anak didik senantiasa mencerminkan nilai-nilai, norma Pancasila yang telah menyatu di dalam dirinya. Untuk itu pembinaan moral Pancasila wajib dilaksanakan oleh pendidik, antara lain dari para guru melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam melaksanakan program PMP ini, guru bidang studi PMP haruslah memiliki kemampuan profesional, kemampuan sosial dan kemampuan personal yang merupakan hal pokok bagi seorang guru.

Berdasarkan pengamatan sepintas, para guru PMP yang melaksanakan tugas sebagai pengajar dan pembina nilai-nilai moral Pancasila kurang menampilkan kemampuan profesionalnya secara mantap, seperti yang dirinci dalam 10 kemampuan dasar guru: (1) penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, (2) pengelolaan program belajar mengajar, (3) pengelolaan kelas, (4) penggunaan media dan sumber pelajaran, (5) penguasaan landasan-landasan kependidikan, (6) pengelolaan interaksi belajar mengajar, (7) penilaian prestasi belajar siswa, (8) pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, (9) pengenalan penyelenggaraan administrasi sekolah.

(10) pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu kemampuan dasar menurut Nana Sudjana (1989: 18) adalah: " (1) Kompetensi bidang kognitif, (2) Kompetensi bidang sikap, (3) Kompetensi bidang perilaku/performance".

Dari kedua pendapat di atas terlihat perbedaan pada peranan kepribadian guru (sikap), padahal masalah kepribadian ini merupakan hal yang penting sebagai syarat bagi pendidik, terutama pendidik nilai-moral. Pada umumnya para guru PMP belum mampu mengelola pengajaran pendidikan moral Pancasila, belum menerapkan metode mengajar pendidikan moral. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar kurang terlihat pendidikan moral atau pendidikan nilai, karena guru hanya sebagai pengajar Pendidikan Moral Pancasila. Akibatnya nilai-moral yang diajarkan hanya bersifat pengetahuan belaka, kurang menyentuh nurani atau dunia afektif siswa.

Untuk meningkatkan mutu pembinaan dan pengajaran Pendidikan Moral Pancasila tidaklah mudah tanpa didukung oleh kemampuan para pengajar (guru) itu sendiri. Dengan demikian sangatlah wajar apabila banyak orang berpendapat bahwa ada kesenjangan antara Pancasila sebagai etika dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikemukakan dalam dialog Nasional 46 tahun Kemerdekaan RI, yang diselenggarakan oleh PPK (Pimpinan Pusat

Kolektif) Kosgoro sebagai berikut:

Pancasila sebagai etika bangsa telah terpisahkan dari kenyataan sehari-hari. Karena itu dibutuhkan upaya menumbuhkan motivasi kepada setiap individu bangsa untuk memajukan diri sehingga mampu mewujudkan yang ideal itu dalam kenyataan. Dan penumbuhan motivasi tersebut sangat bergantung pada upaya pendidikan. (Kompas 31 Agustus 1991).

Lemahnya pembinaan moral Pancasila dalam proses belajar siswa karena kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas, lebih bersifat pengajaran Pancasila. Oemar Hamalik (1980: 167) mengemukakan:

Kegiatan kelas merupakan inti dari pada program pendidikan dan pengajaran, memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar di kelas tersebut. Bagi si belajar yang paling berarti adalah guru. Hubungan dengan tenaga pengajar itu merupakan hubungan yang penting.

Bertitik tolak dari konsep pentingnya kedudukan guru dalam melaksanakan tugas mengajar maka, kemampuan profesional yang mantap mutlak adanya. Sebab kemampuan guru dalam menanamkan pemahaman tentang nilai-moral Pancasila kepada siswa melalui proses pendidikan dan pembinaan akan mendorong anak didik mengakui dan menghargainya. Sehingga anak didik merasa memiliki nilai-nilai tersebut.

Untuk dapat melihat kenyataan di lapangan maka perlu dilakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar PMP yang ditampilkan guru, dalam melaksanakan profesinya pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang masalah yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Pendidikan Moral Pancasila di SMA yaitu kesenjangan mengenai harapan perilaku hasil belajar Pendidikan Moral Pancasila dengan kenyataan perilaku dalam kehidupan sehari-hari para siswa.

Sesuai dengan topik penelitian, sebagai pokok perhatian dan latar belakang masalah maka, rumusan masalah penelitian ini difokuskan kepada upaya untuk memperoleh deskripsi tentang: **Bagaimana kemampuan guru mengelola proses belajar mengajar dalam rangka membina nilai-moral Pancasila sesuai dengan tujuan PMP.**

Rumusan yang telah dikemukakan di atas masih bersifat umum. Untuk lebih memperjelas informasi apa yang ingin didapat di lapangan maka, permasalahan ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk komunikasi yang diciptakan guru pada saat melaksanakan kegiatan di kelas?
2. Bagaimanakah suasana kelas yang diciptakan guru pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar?
3. Bagaimanakah cara guru memberikan pengaruh nilai moral kepada siswa melalui kegiatan belajar mengajar di kelas?

4. Apakah dalam pelaksanaan EBM PMP lebih ditekankan pada pengajaran ataukah pada pembinaannya?
5. Ditingkatmanakah penguasaan materi yang diajarkan guru telah dikuasainya pada proses belajar mengajar di kelas?
6. Sumber apa sajakah yang digunakan sebagai acuan dalam rangka menyajikan materi pelajaran ?
7. Perencanaan apa sajakah yang dibuat guru sebelum penampilan di kelas dalam rangka membina moral Pancasila pada saat proses belajar mengajar ?
8. Bagaimanakah cara guru melaksanakan pembinaan moral Pancasila dalam proses belajar mengajar ?
9. Bagaimanakah sikap guru terhadap siswa pada saat melaksanakan proses belajar mengajar, sudahkah mencerminkan nilai-nilai yang diajarkannya?
10. Bagaimanakah relevansi latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarkan ?
11. Kegiatan apa sajakah yang diikuti oleh guru PMP dalam rangka meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pendidik moral Pancasila ?

D. Definisi Operasional

Penelitian yang diberi topik Penampilan guru PMP pada Proses Belajar Mengajar Dalam Rangka Membina Nilai- Moral Pancasila di SMA Kotamadia Bengkulu (Studi kualitatif Pembinaan Moral Pancasila) ini perlu dijelaskan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman atau ketidak

samaan dalam memberikan makna istilah-istilah yang ada pada judul tesis ini, maka perlu kami batasi atau dipertegas sebagai berikut:

1. Penampilan:

Yang dimaksud dengan penampilan atau disebut juga dengan kata *Performance* dalam Webster Third International Dictionary (1986), dikemukakan: "Performance is the ability to perform; capacity to achieve a desired result". Penampilan untuk melakukan; kapasitas untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan pengertian penampilan menurut Rochman Natawidjaja (1986: 10), sebagai suatu tingkah laku nyata, yaitu keseluruhan kemampuan yang dinyatakan dalam perilaku dalam waktu melakukan tugas. Penampilan dalam penelitian ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang diidentifikasi sebagai tingkah laku nyata yaitu keseluruhan tingkah laku yang dinyatakan dalam perilaku guru yang meler dikaitkan dengan konteks situasional yang tampak pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Proses belajar mengajar:

Yang dimaksudkan adalah suatu aktivitas yang dilakukan pengajar dan pelajar, dalam kegiatan ini terdiri atas fase-fase yaitu (1) Informasi, (2) Transformasi (3) Evaluasi. (S. Nasution: 1986: 9). Sedangkan kegiatan siswa adalah mendengarkan keterangan guru, mencatat hal-hal yang penting, bertanya, melakukan diskusi.

3. Membina moral Pancasila:

Yang dimaksud dengan membina adalah segala upaya yang berupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian atas segala kemampuan/sifat dan pandangan hidup atas sasaran yang dituju. (Soekarno: 1975: 2). Sedangkan yang dimaksud dengan moral adalah seperangkat nilai-nilai, standar atau prinsip yang diterima baik dalam konteks kultur tertentu. (S. Nasution:1989:133). Jadi yang dimaksud dengan membina moral Pancasila disini adalah segala usaha dan upaya yang berbentuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mulai dari penyusunan perencanaan pelajaran, kegiatan membuka pelajaran, penyampaian materi pelajaran sampai menutup pelajaran. Dalam rangka pengembangan, pengendalian atas seperangkat nilai-nilai standar atau prinsip yang diterima baik dalam konteks kultur Pancasila.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini bermaksud untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pendidikan dan pembinaan moral Pancasila terhadap siswa SMA Negeri Kotamadia Bengkulu.
2. Memperoleh gambaran penampilan guru bidang studi PMP pada waktu mengajar di kelas dalam rangka membina moral Pancasila siswa.
3. Mendapatkan gambaran kemampuan guru bidang studi

Pendidikan Moral Pancasila di SMA Negeri Kotamadia
Bengkulu.

Adapun kegunaan penelitian ini, apabila tujuan penelitian dapat dicapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi :

1. Bahan masukan bagi sekolah dalam menyusun program dan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Moral Pancasila khususnya.
2. Masukan bagi guru Pendidikan Moral Pancasila agar dapat lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam pendidikan dan pembinaan moral Pancasila siswa.
3. Bahan perbandingan dengan kegiatan penelitian lain yang sejenis, baik yang telah maupun yang sedang dilakukan.

F. Asumsi Dasar

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah

1. Pendidikan Moral Pancasila sangatlah diperlukan dalam rangka pembentukan kepribadian yang mencerminkan nilai moral Pancasila pada peserta didik, hal ini dapat dilihat dalam UUSPN pasal 31 yaitu: Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Golden Terayon Press:1990:13).
2. Melalui pendidikan dan pembinaan nilai moral

Pancasila anak didik dibina untuk menjadi seorang warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai negara dan bangsanya. Untuk itu peranan guru sangatlah penting. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nana Sudjana; "Guru menempati kedudukan sentral sebab peranannya sangat menentukan. Ia harus mampu menterjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui proses pengajaran di sekolah. (Nana Sudjana:1989:1).

3. Adanya kesenjangan dalam pelaksanaan Pendidikan Moral Pancasila oleh karena itu seorang pengajar yang memiliki kemampuan profesional, kemampuan sosial dan personal dengan baik akan dapat menyajikan pelajaran PMP dengan baik.

G. Kerangka Isi Tesis

Tesis ini secara keseluruhan disajikan dalam lima bab. Secara singkat garis besar pembahasan dalam tesis ini dijelaskan sebagai berikut.

I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan hal-hal mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, asumsi dasar dan garis-garis besar isi tesis.

II. PMP Sebagai Pendidikan Umum di SMA

Bab ini memuat tinjauan secara teoritis yang

merupakan kerangka acuan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut; pendidikan umum di Sekolah Menengah Atas, perlunya pendidikan dan pembinaan moral Pancasila, strategi pengajaran PMP, penampilan guru dalam proses belajar mengajar PMP, kesulitan mencapai harapan ideal dalam PMP.

III. Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan tesis yakni, penentuan sumber data, tahap-tahap penelitian dan pedoman pengolahan data.

IV. Deskripsi dan Interpretasi

Bab ini menyajikan analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dari penelitian ini.

